

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola data bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Mojokerto telah dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi Kementerian Sosial, pemerintah kelurahan, RT/RW, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), surveyor lapangan, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam setiap tahapan pengelolaan data, mulai dari pengusulan, verifikasi, validasi, pemutakhiran data, hingga penetapan penerima bantuan sosial. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses tersebut mendukung terselenggaranya pengelolaan data yang lebih terkoordinasi sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa interoperabilitas data bantuan sosial telah didukung melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama dan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal dalam proses pencocokan data. Kualitas dan keakuratan data diperkuat melalui mekanisme verifikasi dan validasi secara berjenjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun demikian, integrasi sistem informasi antarinstansi belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga proses pertukaran data masih memerlukan koordinasi antarlembaga. Selain itu, dinamika perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menyebabkan proses pemutakhiran data belum selalu dapat mengikuti perubahan yang terjadi secara cepat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Kota Mojokerto dipengaruhi oleh kualitas tata kelola data, interoperabilitas sistem, serta keberlanjutan proses verifikasi dan pemutakhiran data. Ketiga aspek tersebut saling mendukung dalam menghasilkan data penerima bantuan sosial yang lebih akurat sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

- 1) Bagi Dinas Sosial Kota Mojokerto, disarankan untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kelurahan, RT/RW, TKSK, pendamping PKH, serta instansi terkait dalam proses pembaruan data bantuan sosial. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan data secara berkala dan berkelanjutan agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat segera tercermin dalam basis data. Penguatan interoperabilitas data melalui integrasi sistem informasi antarlembaga juga perlu ditingkatkan sehingga proses pertukaran data dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
- 2) Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengembangan tata kelola data bantuan sosial, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penguatan mekanisme verifikasi dan validasi lapangan, percepatan pembaruan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan data diharapkan mampu

meminimalkan terjadinya inclusion error dan exclusion error, sehingga efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial dapat semakin meningkat.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai tata kelola data bantuan sosial dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau membandingkan implementasi tata kelola di beberapa daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat interoperabilitas data, kualitas data, maupun efektivitas ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial secara lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan teori lain sebagai pembanding terhadap teori governance menurut Rhodes juga dapat memberikan perspektif yang lebih beragam dalam menganalisis tata kelola bantuan sosial di Indonesia.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola data bantuan sosial di Dinas Sosial Kota Mojokerto, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Penguatan interoperabilitas data antarlembaga. Dinas Sosial Kota Mojokerto perlu memperkuat interoperabilitas data dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah kelurahan, serta instansi lain yang memiliki data pendukung. Integrasi data yang lebih baik diharapkan mampu mempercepat pembaruan informasi mengenai perubahan domisili, status kependudukan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih efektif.
2. Optimalisasi mekanisme pemutakhiran data secara berkala. Pembaruan data penerima bantuan sosial perlu dilakukan secara rutin melalui verifikasi dan validasi lapangan dengan melibatkan RT/RW, TKSK, pendamping PKH, serta

pemerintah kelurahan. Mekanisme ini penting untuk mengurangi terjadinya inclusion error dan exclusion error, sekaligus memastikan bahwa data penerima bantuan sosial selalu mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data. Dinas Sosial perlu menyelenggarakan pelatihan secara berkala bagi petugas pengelola data, surveyor, maupun pendamping sosial terkait pengelolaan DTSEN, interoperabilitas data, validasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat, baik melalui aplikasi Cek Bansos maupun layanan pengaduan di tingkat kelurahan dan Dinas Sosial. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai perubahan kondisi sosial ekonomi maupun dugaan ketidaktepatan sasaran dapat menjadi sumber data penting dalam proses pemutakhiran data bantuan sosial.
5. Pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi tata kelola data bantuan sosial dengan menggunakan pendekatan komparatif antar daerah atau mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas interoperabilitas data, kualitas data, serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Rekomendasi tersebut telah disusun agar konsisten dengan teori Governance Rhodes, yaitu menekankan penguatan

jaringan antarlembaga, koordinasi, interoperabilitas data, kualitas data, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. I., Marleny, F. D., & Ningrum, A. A. (2025). Optimalisasi Pengalokasian Bantuan Sosial di Kota Banjarmasin Menggunakan Pendekatan Naive Bayes. *Digital Transformation Technology (Digitech)*, 5(1), 240–249.
- Bahri, S. (2023). *METODELOGI PENELITIAN KUALITATIF*.
- Dudy Fathan Ali, Nenden Siti Fatonah, Gerry Firmansyah, H. A. (2023). Data Interoperability Model in Integrated Public Service Applications Based on Government Service Bus (Case Study : Tangerang Regency Communication and Information Office). *Journal of Indonesia Social Science*, 4(09), 778–791.
- Dwi, S., Siregar, P., Irwan, M., & Nasution, P. (2025). Peran Data Integration Dalam Mewujudkan Interoperabilitas Sistem Informasi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(June), 555–560.
- Fajar, M. N. (2023). TANTANGAN TATA KELOLA INTEROPERABILITAS DALAM SISTEM INFORMASI PROFIL DESA DAN KELURAHAN SEBAGAI UPAYA Mendukung PROGRAM SATU DATA INDONESIA. *Jurnal Analis Kebijakan*, 7(1), 48–68.
- Ferdyana, N. A., Wijaya, D., & Rinayuhani, T. R. (2025). Dari Partisipasi ke Keberlanjutan: Implementasi Tata Kelola Inklusif dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. *Journal of Global Humanistic Studies*, 3(4), 75–84.
- Hahury, J. F. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE GUNA EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN KELURAHAN SENGKUANG. *FOKUS: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 23(Nomor 1), 175–187.
- Herlambang, A. B., & Wicaksono, I. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SLAWU, KABUPATEN JEMBER. *Jurnal Interelasi*, 1(4), 264–275.
- Isnawiyah, Siti Mujanah, R. N. (2025). ePaper Bisnis : International Journal of Entrepreneurship and Management. *EPaper Bisnis : International Journal of Entrepreneurship and Management 2025*, 2(25), 146–163.
- Jan Kooiman. (2003). *Governing as Govern ance*.
- Korompis, I. A. (2025). DAMPAK PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI KELURAHAN RANOTANA WERU KECAMATAN WANEA KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA. *IPDN*.
- Maulana, R. Y., & Government. (2020). Collaborative Governance in the Implementation of E-Government- Based Public Services Inclusion in Jambi Province , Indonesia. *Journal of Governance*, 5(1), 91–104.

- Mikraj, A. L., Herlinda, D., Nielwaty, E., & Elsi, M. (2026). Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6(1), 1708–1722. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8997>
- Muchsin, M. (2025). Digital Governance dan Tantangan Integrasi Data Sektor Publik : Studi pada Satu Data Indonesia di Tingkat Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(2). <https://doi.org/10.33592/jiia.v15i2.7872>
- Nadya Grestyana, Melia Sintha, & S. I. T. (2024). Dari Data ke Dana: Proses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kota Palangka Raya. *Jurnal Sosial Politik ESOLUSI*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v7i1.7802>
- Nanda muzahra, M. I. P. N. (2025). Strategi untuk menjaga konsistensi dan akurasi data dalam pengambilan keputusan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 641–647.
- Noerkaisar, N. (2021). PEMERINTAH UNTUK MENGATASI DAMPAK COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen Pembendaharaan*, 83–104.
- Nurjanah, D., & Zainuri, A. (2025). Administrasi dan Supervisi Pendidikan Islam dalam Deep Learning Penerapan Bermuatan Ethno Kurikulum Berbasis Cinta pada Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9, 34811–34828.
- Nurofik, I., Kolopaking, L. M., Hartoyo, S., Daerah, M. P., & Barat, J. (2022). Efektivitas Program Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT dan PKH) di Kota Mojokerto. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 10(7), 570–587.
- Nuryana, J. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(2), 356–383.
- Pascasarjana, P., Studi, P., Kelola, T., & Program, S. (2026). STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA KEARSIPAN SENI BERBASIS DIGITAL DI INSTITUT SENI INDONESIA BALI. In *ISI Denpasar*.
- Pelayanan, D., Di, P., & Revolusi, E. R. A. (2025). Digitalisasi pelayanan publik di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2, 358–369.
- Pradangga, A., & Yamasari, Y. (2025). Validasi Data Kemiskinan Berbasis Web Menggunakan Algoritma Isolation Forest di Mojo Surabaya. *JINACS: (Journal of Informatics and Computer Science)*, 07(02), 466–473.
- Putri Ayu Maisarah, Fadhilla Fonna, R. F. (2025). PERAN KRITIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MEWUJUDKAN E-GOVERNMENT YANG RESPONSIF, TRANSPARAN, DAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA. *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan*, 6(3), 51–67.
- R. A. W. Rhodes. (2007). *Peripheral Vision Understanding Governance: Ten Years*

On. <https://doi.org/10.1177/0170840607076586>

- R.M. Iman Rifai Rusdy, S. F. (2023). PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 05(95), 218–239. <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Rahmadi Agus, Rizqi Elmuna Hidayah, A. Y. N. (2025). Pengembangan platform web untuk monitoring dan evaluasi data bantuan sosial berbasis teknologi informasi 1. *Jurnal Ilmiah : JSSI*, 3(2), 59–66.
- Ramadhani, N. I. A. (2025). *Implementasi program bantuan pangan non tunai di desa moutong tengah kecamatan moutong kabupaten parigi moutong*.
- Sania, H. S. N. (2025). Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan “ LAPOR ” Sleman Sebagai Perwujudan Smart Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(3), 618–636.
- Santoso, A., Kurniawat, E., & Dhani, A. U. (2023). KAJIAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KOTA SEMARANG. *JURNAL RIPTAK*, 17(1), 79–94.
- Setiawan, A. (2025). Transformasi Digital Berbasis Data di Kabupaten Jember : Strategi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Menuju Era 5 . 0. *Jurnal Interelasi*, 1(4), 396–402.
- Sidik, A. M., Nugroho, G. W., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Sukabumi, U. M., Pangan, B., Tunai, N., & Tunai, B. L. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL : STUDI KOMPARATIF BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAN DANA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 2644–2654.
- Singal, M. R. (2025). Implementasi Kebijakan E-Government untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Social, T., Distribution, S., Through, I., & Social, I. (2020). Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi " Cek Bansos ". *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIMUS*, 6, 204–215.
- Sosial, K. (2025). *PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL*.
- Supriyanto, A., Mulyani, S., Ariyanto, T., Razaq, J. A., Informatika, T., Stikubank, U., Informatika, M., Vokasi, F., & Stikubank, U. (2023). INFORMATION FOR THE IDENTIFICATION AND VERIFICATION OF PROSPECTIVE POVERTY SOCIAL ASSISTANCE RECIPIENTS. *Jurnal Teknik Informatika*, 4(2), 429–440.

- Tamrin, L. (2023). Efektivitas Kerja Pegawai Dinas Sosial Dalam Verifikasi dan Validasi Data Penerima Dana Bantuan Sosial di Kota Pekanbaru. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 7(1), 177–182.
- Tando, C. E., & Haryanti, R. H. (2020). Collaborative Governance In Public Service In Indonesia: A Systematic Mapping Study Received: *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 144–163. <https://doi.org/10.14710/jis.18.2.2019.144>
- Thassya Hanifah, Rio Yusri Maulana, D. S. (2026). DIGITALISASI LAYANAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK : STUDI INTEROPERABILITAS DATA DISDUKCAPIL DENGAN INSTANSI LAYANAN PUBLIK DI KOTA JAMBI. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 12(1), 153–168.
- World Bank. (1992). *Governance The World Banks Experience*.